

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus dilakukan untuk menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat. Berdasarkan pada seperangkat nilai yang dianut, yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang diharapkan. Pembangunan ini lebih diarahkan pada pembangunan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap warga masyarakat. Adapun dengan pembangunan, masyarakat diharapkan mampu mengelola alam bagi peningkatan kesejahteraannya (Subandi, 2011).

Pembangunan bertujuan untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan perdesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah perdesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha perdesaan. Pengembangan ekonomi di perdesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama (Sofian, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa juga telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan. Pendampingan menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai diantaranya melalui peningkatan pengetahuan,

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Meninjau masalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pedesaan, maka salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh desa yaitu dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diartikan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Selain itu, dengan adanya BUMDes diharapkan desa menjadi lebih mandiri dalam hal pengelolaan aset desa atau sumber daya desa agar dilakukan secara optimal dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera.

Pada dasarnya dalam penyelenggaraan BUMDes yang dilakukan oleh setiap desa tidaklah selalu berjalan sesuai harapan. Kenyataannya tidak sedikit Badan Usaha Milik Desa yang tersebar di seluruh Indonesia yang tidak terurus. Oleh sebab itu, dalam mengelola usaha desa diperlukan adanya SDM yang benar-benar mengetahui bisnis agar dapat terus berkembang dan berinovasi. Dengan demikian setiap BUMDes yang didirikan

mempunyai visi-misi yang kokoh dan terus menciptakan keuntungan maupun lapangan kerja tetap bagi masyarakat. (Sasauw et al, 2018).

Pertumbuhan BUMDes pada setiap desa sudah mengacu pada peraturan daerah setempat, dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan di dalam setiap desa. Pada beberapa desa telah berhasil mengembangkan BUMDesnya dengan berbagai macam pengelolaan yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Perlunya dilakukan kerja sama antar pemerintah kampung dan masyarakat dalam membangun BUMDes agar sesuai dengan keinginan bersama.

Salah satu BUMDes yang berhasil dikelola yaitu BUMDes Tirta Mandiri. Strategi keberhasilan yang dilakukan yaitu dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya karena memiliki kepala desa yang *visioner*, masyarakat desa yang memahami dan berperan aktif, memiliki sumber daya alam yang potensial, serta memiliki badan pengawas dalam kegiatan operasionalnya. Faktor eksternal adanya dukungan pemerintah dengan dana desa, gaya hidup masyarakat atas wisata. Alhasil BUMDes memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sebagai pengentas kemiskinan. Dampak ekonominya seperti membuka lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan usaha kreatif (Baskoro, 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan hampir di seluruh wilayah pedesaan di Indonesia. Begitu juga dengan salah satu kampung yang bernama Hakim Bale Bujang di Kota Takengon. Takengon merupakan salah satu daerah yang mempunyai banyak tempat wisata. Salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh BUMK adalah Bur Telege, Bur Mulo Florest dan Lukup Penalam. Unit usaha lainnya juga bergerak dalam bidang simpan pinjam, pencacah plastik, printing sablon serta produksi makanan khas Aceh

Tengah seperti stik dan abon depik, depik merupakan ikan khas dari Laut Tawar dan masih banyak lagi usaha yang ada didalamnya.

Bur Telege memiliki arti, Bur yaitu gunung dan Telege yaitu sumur maksudnya ialah sumur yang berada di pegunungan. Kawasan ini memiliki potret wisata alam yang potensinya dapat dikembangkan. Kawasan tersebut merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di atas bukit dengan *view* yang menarik. Dari puncak Bur Telege di sisi selatan dapat melihat hutan pinus dan pegunungan yang luas membentang. Sementara dari sisi Timur terlihat Danau Lut Tawar dan Kota Takengon (Kompas, 2019).

Tempat ini awalnya merupakan permukaan gunung yang terdiri dari semak belukar dan sulit diakses oleh masyarakat umum. Dulunya hutan ini menjadi tempat bagi orang-orang yang suka mengonsumsi barang-barang terlarang dan tempat berpacaran. Oleh karena itu, pada tahun 2017 pemuda kampung dan masyarakat setempat berinisiatif untuk mengembangkan hutan pinus tersebut menjadi objek wisata. Dengan semua proses pembangunan destinasi ini dikelola secara swadaya bersama masyarakat setempat.

Pemerintah meminjamkan tanah pegunungan seluas 208 Ha yang disulap menjadi wisata bukit kekinian. Mereka memanfaatkan potensi yang ada untuk langkah awal pengembangan lokasi wisata seperti, menggunakan kayu bekas untuk dijadikan spot-spot foto yang unik sehingga dapat menarik wisatawan. Seiring berjalannya waktu, tempat ini sekarang menjadi tempat wisata yang sering dikunjungi oleh kalangan terbatas yang umumnya dari kalangan anak muda.

Pembangunan Wisata Bur Telege yang dikelola oleh BUMK ini tidak hanya dapat memberdayakan masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian dan juga lapangan pekerjaan. Masyarakat Hakim Bale Bujang hampir 15 KK (Kartu Keluarga) yang

menggantungkan pekerjaannya di wisata ini. Seperti dibagian menjual pernak-pernik, penjaga cafe, dan di tempat permainan anak-anak. Lapangan pekerjaan yang terbatas mendorong pemuda kampung mengusulkan pembangunan wisata di Kampung Hakim Bale Bujang. Pembangunan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada serta dapat memberdayakan masyarakat dengan mendapatkan peluang kerja di dalamnya.

Oleh karena itu, dengan adanya BUMK diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Namun di dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan mengembangkan potensi kampung terdapat masalah yang harus dihadapi seperti dalam hal pergerakan SDM (Sumber Daya Manusia), tersendatnya pembayaran SPP (Surat Permintaan pembayaran) sehingga mengalami keterlambatan dalam pembaharuan dan pengembangan objek wisata. Kemudian juga masih adanya masalah sampah yang terus terjadi pada usaha wisata Bur Telege akibat dari banyaknya antusias masyarakat dalam mengunjungi objek wisata tersebut.

Adapun mengapa penelitian ini perlu dikaji oleh Antropologi yaitu karena adanya keterkaitan antar budaya masyarakat yang memiliki pemikiran yang berbeda. Berhubungan dengan paradigma antropologi yaitu teori struktural fungsional yaitu untuk menjawab pengelolaan dan faktor penghambat dan pendukung terhadap kehidupan sosial masyarakat. Menurut teori ini masing-masing struktur sosial di masyarakat memiliki peran yang dimainkan yang terdiri dari komponen-komponen dalam masyarakat. Komponen tersebut seperti pemerintah desa, masyarakat dan pihak yang mengelola objek wisata tersebut.

Jadi dalam pengelolaan wisata ini, seluruh masyarakat di sekitar objek wisata diminta untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan pembangunan. Karena pembangunan

objek wisata oleh BUMK ini ditujukan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Pengelolaan Objek Wisata Bur Telege Oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Hakim Bale Bujang Di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola pengelolaan kawasan Objek Wisata Bur Telege oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Hakim Bale Bujang di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengelolaan kawasan Objek Wisata Bur Telege oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Hakim Bale Bujang di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola pengelolaan kawasan Objek Wisata Bur Telege oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Hakim Bale Bujang di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung pengelolaan kawasan Objek Wisata Bur Telege oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Hakim Bale Bujang di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan sosial khususnya bagi antropologi, agar dapat menjadi bahan acuan ataupun referensi bagi pembaca mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan dapat lebih memahami bagaimana mengelola dan mengembangkan objek wisata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pemikiran kepada pihak terkait, terutama pemerintah desa dan kepada para pengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dalam menjalankan pengelolaan kawasan wisata yang berbasis kemandirian sebagai upaya dalam pemberdayaan kesejahteraan desa.